



BISNIS DAN POLITIK: STUDI KASUS KETIDAKSETARAAN AKSES AIR DI INDIA

Tsania Chairani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Water is a source of life for all living things, one of which is for humans. The supply of clean water that is safe for consumption is currently only available for 3 percent of the total of 70 percent of the earth's water area. India as a country with a large population, has a high chance of experiencing a water crisis. This is evidenced by the low quality of India's water, the existence of unequal access of it and the ineffectiveness of government cooperation with foreign companies recruited to manage water in India. Through this research, the author try to explain the relationship between the government's cooperation with foreign companies which causes the existence of unequal access to water in India. By using the theory of Marxism which views world politics as an exploitative and conflictual desert between the bourgeoisie and the proletarian class as well as the theory of Monopoly Advantage which discusses the importance of monopoly over a foreign company in another country, this research argues that cooperation by the government and foreign companies has resulted in the exploitation of water allotment for people in rural areas and led to unequal access to water in India.

Keywords: Inequality in Water Access, India, Exploitation, Marxism

PENDAHULUAN

Seiring dengan majunya teknologi dan semakin meningkatnya jumlah populasi dunia memiliki arti bahwa kebutuhan sumber daya akan terus meningkat. Salah satu sumber daya yang sangat penting bagi berjalannya kehidupan makhluk hidup adalah air. Penggunaan air yang terus meningkat tanpa adanya tindakan penghematan sumber daya

dapat menyebabkan menurunnya tingkat persediaan air tanah bumi. Berdasarkan data dari BBC, peningkatan pengambilan air tanah semenjak tahun 1961 hingga 2014 sudah melonjak hingga 2,5 kali lipat. 67 persen dari pengambilan air ini digunakan untuk sektor irigasi. Dalam buku yang ditulis oleh Barlow dan Clarke (dalam Sampath et al., 2003) mereka menyebutkan bahwa konsumsi air dunia akan meningkat sebanyak dua kali lipat setiap 20 tahun dimana angka ini jauh lebih tinggi dari peningkatan jumlah pertumbuhan populasi. Rendahnya ketersediaan air menyebabkan sekitar satu miliar orang kekurangan akses air bersih yang menyebabkan adanya perkiraan permintaan air melonjak drastis hingga 56 persen pada tahun 2025.

Dalam menghadapi permasalahan diatas, Bank Dunia kemudian memiliki ide untuk mengatasi krisis air yang semakin berkembang dengan cara memprivatisasi sumber air yang kemudian mengarahkan kegiatan pengolahan air sebagai komoditas. Salah satu negara yang setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh Bank Dunia adalah India. India kemudian mengubah kebijakan atas airnya pada tahun 2002 dengan menambahkan poin pada pasal no. 13 yang berbunyi "...partisipasi sektor swasta harus didorong dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan proyek sumber daya air untuk berbagai penggunaan" (Ministry of Water Resources, 2011). Penambahan poin ini diharapkan dapat membantu untuk memperkenalkan ide- ide inovatif, menghasilkan sumber daya keuangan, dan memperkenalkan manajemen perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat.

India sebagai negara dengan jumlah populasi yang besar, mengalami kesulitan untuk mengatasi tingginya permasalahan yang terdapat didalam negara terutama dalam bidang pengelolaan air. Dalam data yang ditulis dalam *World Economic Forum* tahun 2019, diperkirakan sebanyak 70 persen sumber air di India tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya filtrasi air limbah yang dialiri ke sungai dan sedikitnya proses pengolahan air limbah yang memadai (World Economic Forum, 2019). Tingginya jumlah air tidak layak yang mengalir India ini kemudian menjadikan angka sumber penyakit akibat air meningkat hingga 21 persen. (The Water Project, n.d.).

Munculnya kebijakan pemerintah untuk mengundang partisipasi sektor swasta menyebabkan beberapa dampak yang terjadi salah satunya adalah eksploitasi air tanah yang kemudian menyebabkan rendahnya tingkat kelayakan air di sungai Gangga karena konsekuensi pengalihan dan kegiatan pembendungan air. Selain itu, terdapat aksi unjuk rasa warga lokal dimana pada tahun 2005, terdapat 5 pengunjuk rasa yang ditembak karena mendemo pengaliran air dari bendungan yang terdapat di Bisalpur. Hal ini kemudian diprediksi mampu menjadikan adanya konflik air antara kelompok kaya dan menengah kebawah yang berada di India (Shiva, 2008).

Lebih lanjut, tulisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sumber bacaan rujukan. Beberapa sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Vandana Shiva berjudul "*Globalization from Below: Ecofeminist Alternatives to Corporate Globalization*" menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan asing dalam pengelolaan air India merupakan suatu bentuk perampasan hak investasi publik karena mengakibatkan dampak ekologis dan sosial yang besar (Shiva, 2008). Selanjutnya, dalam laporan yang ditulis oleh Lembaga Swadaya Masyarakat India Water Portal, dijelaskan bahwa kegiatan privatisasi merupakan kegiatan korporatisasi dimana perusahaan akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan menambang air di India (India Water Portal, n.d.).

Dari beberapa bacaan tersebut, terdapat kekosongan penelitian dalam aspek bagaimana kelas sosial mampu memainkan peran dalam tata kelola air dan juga mengakibatkan permasalahan pada kelas rendah di India. Kekosongan ini akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Marxisme dan teori keunggulan monopoli.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan dua teori untuk menganalisa isu yang dibawa dalam tulisan ini. Teori pertama adalah marxisme. Marxisme merupakan teori yang muncul dari pemikiran Karl Marx pada abad ke-19 dengan menuliskan Manifesto Komunis, dimana di tulisannya tersebut ia membukanya dengan kalimat, "sejarah dari

seluruh masyarakat, adalah sejarah tentang perjuangan kelas.” Karl Marx beranggapan bahwa sejarah umat manusia selalu menjadi kisah perjuangan kelas, kontes antara kelas yang mengeksploitasi dan dieksploitasi, dan juga pembagian antara kelas yang memiliki kekuasaan dan yang tertindas. Dalam hal ini, kelas yang tereksploitasi dan tertindas atau biasa disebut kelas proletariat tidak dapat mencapai emansipasinya dari kelas yang mengeksploitasi—borjuis dalam membebaskan penindasan, perbedaan kelas dan kelas tersebut . Ia menyangkal adanya teori “natural harmony” dimana pada abad ke-18 ditunjukkan bahwa kelas- kelas sosial mulai terpolarisasi dan terpecah menjadi dua kelompok yaitu penindas dan tertindas (Friedrich, 1955).

Teori kedua adalah teori keunggulan monopoli yang muncul dari tesis Stephen Hymer pada tahun 1960. Pada tesis ini dituliskan bahwa investasi asing langsung terjadi karena perusahaan multinasional harus memperoleh monopoli di atas perusahaan lokal di negara lain sehingga sebuah perusahaan mampu menguasai satu produk yang terdistribusi secara luas di suatu negara. Hymer juga mencetuskan paradigma OLI¹ yang digunakan untuk menganalisis investasi internasional dari perspektif kepemilikan, lokasi dan internalisasi perusahaan. Internalisasi merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan kepemilikan keunggulan kompetitif di pasar baru (Fuentes, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa perusahaan multinasional mampu mendapatkan keunggulan ekonomi lebih besar dan menyebabkan isu domestik di India terutama pada isu tata kelola air dan adanya ketidaksetaraan akses pada hal tersebut.

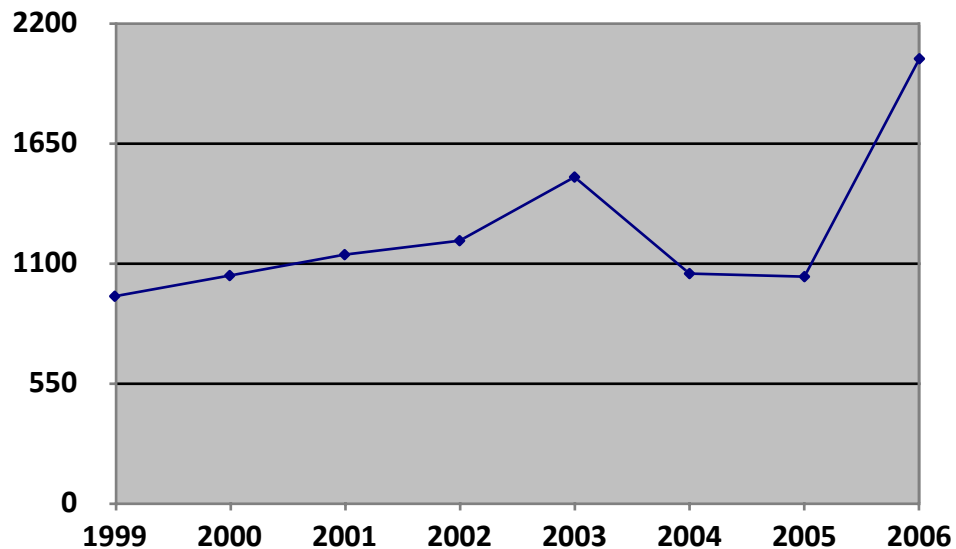
PEMBAHASAN

REFORMASI EKONOMI INDIA TAHUN 1991

¹ Paradigma OLI merupakan singkatan dari *Ownership, Location and Internalization* (Fuentes, 2018).

Dalam masa reformasi ekonomi, India mengalami beberapa keterlambatan pada pertengahan tahun 1991. Namun, hal ini tidak memberhentikan masuknya arus investasi asing masuk ke dalam negara. Semenjak tahun 1991 hingga tahun 2007, India telah mendapatkan investasi asing sebesar 65.8 miliar dolar Amerika. Pemasukan investasi asing ini sebagian disebabkan oleh investasi perusahaan asing seperti Walmart, Toyota dan Kohlberg Kravis Roberts & Co. yang menginvestasikan dana sebesar 900 juta dolar Amerika kepada Flextronic Software Systems Ltd. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perusahaan asing untuk memperluas kehadirannya di negara tujuannya (Belhoste & Grasset, 2008). Semenjak adanya liberalisasi ekonomi India, angka peningkatan perusahaan asing semakin meningkat yang awalnya hanya berjumlah 950 perusahaan pada tahun 1999 menjadi hingga 2040 perusahaan pada tahun 2006 seperti grafik dibawah ini.

Grafik 1. Pertumbuhan Perusahaan Asing di India (periode 1999 hingga 2006)



Sumber: (Ministry of Corporate Affairs, Annual Report 2006) diolah oleh penulis

India dengan mata uangnya, Rupee, tidak memiliki konvertibilitas yang penuh. Maka dari itu, India memiliki peraturan yang mengatur investasinya sendiri. Bagi perusahaan asing yang berinvestasi di India diwajibkan untuk memenuhi peraturan yang mengatur investasi asing yang berada dibawah FEMA. Investasi asing

yang masuk ke India dapat dibedakan menjadi dua kategori, kategori pertama adalah investasi asing yang tidak memerlukan izin pemerintah sebelumnya (Luthra & Koshy, 2017). Sejarah dan budaya India yang sangat kental hingga saat ini mampu memberikan dampak pada kerjasama antara pemerintah dan perusahaan multinasional asing yang harus secara terus menerus memperjuangkan stereotypes atas pekerja yang akan mulai bekerja didalam negara tersebut.

PERUSAHAAN ASING DI INDIA

Munculnya perusahaan asing di suatu negara tentu diawali dengan pemahaman akan budaya bisnis, manajemen, dan daya tarik untuk investasi asing di negara yang dituju. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan asing di India yang melihat peningkatan arus masuk investasi asing di India sebagai indikator penting bagi perusahaan multinasional asing.

Dengan banyaknya jumlah populasi India yang mencapai 1,6 miliar jiwa, hal ini menjadi kesempatan besar bagi perusahaan untuk melebarkan bisnisnya. Kemudahan berbisnis yang ditawarkan pemerintah India adalah antara lain dengan membuat situs web untuk investor yang berisi tentang dukungan utama dan *FAQ* bagi perusahaan asing yang berminat untuk melebarkan bisnisnya di India. Hingga akhir tahun 2014, telah terdaftar sebanyak 2.000 perusahaan asing yang bergerak di 20 sektor kerja dengan 99 negara yang bekerja didalamnya (Luthra & Koshy, 2017). Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, terdapat sebanyak 124 perusahaan asing baru yang mendaftarkan diri untuk memulai bisnisnya di India. Hal ini menjadikan jumlah total perusahaan asing yang masuk ke India semenjak tahun 2018 menjadi sebanyak 242 perusahaan (Economic Times, 2021).

KEBIJAKAN UNTUK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA AIR INDIA

Dalam merencanakan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air domestiknya, pemerintah muncul dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang

dibuat adalah dengan melahirkan adanya National Water Policy atau NWP. NWP telah mengalami beberapa revisi dari yang pada awalnya dibuat pada tahun 1987, kebijakan selanjutnya dikeluarkan pada tahun 2002 hingga draft terakhirnya muncul pada tahun 2012.

National Water Policy pertama tahun 1987 mencakup beberapa target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pengelolaan air domestiknya. Target tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan luas daerah irigasi yang mampu meningkatkan output makanan dari yang berjumlah 150 juta ton pada tahun 1987 menjadi 240 juta ton pada tahun 2000, menyediakan sumber air minum untuk seluruh masyarakat India dan menyediakan 80 persen kebutuhan sanitasi untuk penduduk perkotaan dan 20 persen untuk penduduk pedesaan (Paranjpye & Rathore, 2014).

Kebijakan kedua terdapat pada amandemen *National Water Policy* pada tahun 2002 yang menyebabkan adanya perubahan tentang pengelolaan air di India yang disebabkan oleh tantangan baru pada sektor sumber daya air. Isi dari NWP tahun 2002 ini dimulai dengan menekankan bahwa air merupakan sumber daya alam utama dan merupakan kebutuhan dasar manusia serta sebuah aset nasional yang sangat berharga. Karena hal tersebut, pengelolaan dan perencanaan sumber daya air perlu diatur dalam perspektif nasional. Namun, dalam NWP 2002 ini terdapat salah satu isi yang menonjol dimana pada kebijakan tersebut tertulis bahwa partisipasi sektor swasta harus didorong dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan proyek sumber daya air untuk penggunaan yang beragam (National Water Policy, 2002). Karena poin tersebut, terdapat banyak perusahaan yang masuk dan menjalankan bisnisnya di India. Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber air yang mereka miliki. Pengaturan dalam tata kelola yang diberikan oleh pemerintah ini menyebabkan perusahaan banyak melakukan pengaliran air sungai yang tertuju hanya pada daerah tertentu, menghasilkan adanya pengisolasian masyarakat sekitar dari sumber air mereka (Central Water Commission).

Kebijakan terakhir dalam pengelolaan sumber daya air nasional India terjadi pada tahun 2012 dimana dalam NWP ini terdapat beberapa konsep baru yang dibawa

oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan tentang air nasional. Beberapa konsep baru yang dibawa adalah antara lain dengan memasukan *Public Trust Doctrine* dan membuat Undang-Undang yang berhubungan dengan lingkungan serta makhluk hidup seperti *Prevention of Cruelty to Animals Act* dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan yang berbicara mengenai hak atas segala jenis makhluk hidup untuk mengakses air, makanan dan habitat alam (Paranjpye & Rathore, 2014).

Perbedaan antara NWP 2012 dengan kebijakan sebelumnya terdapat pada prioritasnya dalam memperlakukan air sebagai barang ekonomi dimana pada NWP sebelumnya memiliki prioritas untuk mengalokasikan air untuk keperluan minum sama dengan keperluan air untuk sektor agrikultur atau pertanian. Kebijakan sebelumnya juga memiliki prioritas untuk membuat tenaga air, industri dan navigasi (Seth, 2012). Dalam NWP 2012, kebijakan ini masih belum menjelaskan apakah sumber daya air tanah merupakan kepemilikan atas perseorangan atau milik publik sehingga air tanah sering dieksploitasi secara berlebihan di beberapa area (Paranjpye & Rathore, 2014).

IMPLEMENTASI DALAM JALANNYA KEBIJAKAN PRIVATISASI AIR DI INDIA

Langkah India untuk mereformasi sektor air sudah terjadi selama kurang lebih satu setengah dekade terakhir. Langkah ini dilakukan berdasarkan model keberlanjutan keuangan yang diajukan oleh lembaga internasional seperti pemulihan biaya penuh, rasionalisasi tarif air, privatisasi dan kemitraan dengan sektor publik dan swasta lintas perkotaan dan pedesaan serta sub sektor agrikultur (Dwiwedi, 2016). Privatisasi air di India memiliki beberapa model. Model Partisipasi Publik-Swasta (*Public Private Partnership* atau PPP) sering digunakan untuk membahas tentang penyediaan air perkotaan, pengolahan air limbah, pembangkit listrik tenaga air dan sektor irigasi (Manthan Adhyayan Kendra, 2016). Selain PPP terdapat adanya model Partisipasi Sektor Swasta yang mencakup bagian luas dari pengaturan hukum dimana perusahaan swasta terlibat dalam penyediaan layanan yang disediakan oleh badan pemerintah (IGI Global, n.d.).

Dukungan atas privatisasi di India diberikan oleh beberapa organisasi dan multinasional baik dari domestik hingga internasional. Dukungan ini antara lain diberikan oleh lembaga keuangan, *United States Agency for International Development* (USAID), hingga Indo-French Protocol yang kemudian menghasilkan adanya penandatanganan kontrak oleh beberapa pemerintah negara bagian, perusahaan kota dan dewan yang memiliki kepentingan dalam pasokan air untuk menjalin bisnis dengan berbagai multinasional yang bekerja dalam pengolahan air dan infrastruktur domestik. Penandatanganan kontrak ini dilanjutkan dengan munculnya 22 proyek privatisasi di sektor penyediaan air, pengolahan limbah cair dan padat, pasokan air industri dan proyek irigasi di negara bagian seperti Delhi, Punjab, Gujarat, Chhattisgarh, Jharkhand, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Himachal Pradesh, Rajasthan, Bengal Timur, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh dan Sikkim. Munculnya privatisasi air di India kemudian membuka kesempatan bagi perusahaan untuk bekerja dalam bidang tenaga air atau *hydropower*. Keterlibatan perusahaan dalam sektor tenaga air ini dapat dilihat dari adanya pembangunan bendungan air dan kontrol penuh pada wilayah perairan seperti sungai sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air di berbagai wilayah negara tersebut (Manthan Adhyayan Kendra, 2016).

Segala bentuk Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah India mengenai adanya privatisasi air merupakan hasil dari pengaruh studi Bank Dunia mengenai status berbagai sub-sektor seperti pengelolaan air tanah, irigasi, perdesaan, penyediaan air perkotaan dan alokasi air antar sektor. Skema yang diprakarsai oleh pemerintah India dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat Misi Pembaruan Perkotaan Nasional Jawaharlal Nehru atau JNNURM dan Skema Pembangunan Infrastruktur Perkotaan untuk Kota Kecil Menengah atau UIDSSMT. Kedua skema ini dilakukan dengan membentuk adanya reformasi dalam penyediaan air dengan melibatkan partisipasi sektor swasta didalamnya (Manthan Adhyayan Kendra, 2016). Skema JNNURM memiliki rencana untuk merenovasi jaringan pasokan air kota dan pabrik pengolahan limbah. Tahap selanjutnya dari rencana badan tersebut adalah dengan meluncurkan misi pembaruan perkotaan senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat dalam tenggang waktu empat bulan sebagai cara untuk menutupi defisit infrastruktur

dan juga sebagai dana untuk mengelola program urbanisasi. Dalam menjalani tahap ini, badan JNNURM meminta adanya peran dari sektor swasta dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara dengan lebih besar dan proaktif hingga tahun 2017 (India Times, 2012). Kedua skema yang dibentuk oleh pemerintah dalam JNNURM dan UIDSSMT menuliskan beberapa rangkaian reformasi yang harus diterima dan diterapkan oleh badan pengatur di suatu daerah sebelum dapat memanfaatkan dana yang diberikan dari pusat untuk perbaikan dan peningkatan sistem pasokan air.

Kegiatan privatisasi air di India merupakan hal yang lumrah terjadi di India semenjak adanya liberalisasi ekonomi pada tahun 1991. Privatisasi air ini juga merupakan salah satu cara yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan krisis air di India yang kemudian menghasilkan adanya kegiatan untuk mengolah air sebagai komoditas (Bhattacharya & Banerjee, 2015). Kegiatan privatisasi air di India terjadi tidak hanya terjadi di dalam sektor pengelolaan air namun hal ini juga merambat hingga sektor pembangkit listrik tenaga air atau *hydropower*. Kebijakan yang dibuat untuk kepentingan sektor pembangkit listrik ini juga dinilai lebih memprioritaskan peran investasi asing dan swasta dalam proyek pembangkit listrik tenaga air (Banerjee, 2014).

Meskipun India telah melakukan beberapa amandemen pada kebijakan mengenai pengelolaan energi negaranya, dalam Kebijakan Tenaga Air Baru India tahun 2008, pemerintah tetap memiliki komitmen pada semua proyek tenaga air yang sedang berlangsung dan juga tetap pada komitmen untuk mengundang partisipasi sektor asing dan swasta dalam mengatur hal tersebut. Kebijakan tersebut berbunyi: “meskipun organisasi sektor publik akan terus memainkan peran penting dalam pengembangan skema baru, hal ini tidak akan cukup untuk mengembangkan potensi air yang tersisa. Investasi swasta akan didorong di tahun-tahun mendatang dan suasana kondusif untuk menarik dana sektor swasta akan disediakan.” (Government of India, The Ministry of Power. Diterjemahkan oleh penulis).

DAMPAK ATAS PRIVATISASI AIR DI INDIA

Delhi Jal Board (DJB), badan yang memiliki kewenangan untuk menyediakan air bersih terfiltrasi ke New Delhi telah mengontrak perusahaan Suez Degremont, perusahaan asal Perancis untuk menjalankan proyek pengelolaan air dan limbah dari beberapa daerah di India seperti Uttar Pradesh, Coimbatore dan pengelolaan di Sonia Vihar untuk di alirkan ke Delhi dan kota-kota lain yang berada di wilayah India. Pemerintah telah memberikan jaminan bahwa profit dari proyek tersebut akan diberikan kepada Degremont dengan menggunakan dana publik dan memberikan akses gratis pada sumber daya air India kepada perusahaan tersebut. Karena pemerintah memberikan akses gratis akan pengelolaan air kepada perusahaan asing, pemerintah kemudian mendapatkan bagian dari penjualan produk air bersih terfiltrasi dari perusahaan Degremont kepada masyarakat.

Munculnya paham bahwa air sudah bukan lagi sebuah hak bagi masyarakat melainkan menjadi komoditas ekonomi, kebijakan atas privatisasi air menyebabkan adanya beberapa dampak. Dampak pertama terjadi di sektor ekonomi dimana perusahaan swasta yang sedang menjalankan proyeknya di suatu daerah memberikan akses bagi masyarakat dengan syarat adanya pembayaran retribusi untuk layanan yang diberikan. Hal ini menjadikan adanya penurunan akses ke layanan bagi masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan di suatu wilayah di India (Dwivedi, 2010). Selain itu, kemudahan berbisnis di India dapat membuat perusahaan memegang kontrol pasokan air domestik, menaikkan tarif air, revisi otomatis tarif air setiap satu hingga tahun yang dapat mencapai 10 persen, mengabaikan dan melarang penggunaan sumber daya air lokal, dan melakukan pembagian air rumah tangga dalam masyarakat (Dwivedi, *An Overview of Water Sector Reforms in India*, 2015).

Dampak lain dalam bidang ekonomi adalah dengan naiknya harga pasokan air. Meningkatnya harga pasokan air ini terkadang terjadi sebelum adanya proyek partisipasi sektor swasta terjadi dengan alasan untuk mengantisipasi. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menarik perusahaan swasta sebagai mitra proyek yang akan datang (Kaur, 2003). Di India, sudah tidak ada lagi sumber air yang dapat diakses secara bebas. Kemungkinan adanya ketidak

terjangkauan harga air minum bersih yang layak konsumsi bagi beberapa masyarakat juga tergolong tinggi. Ketidakmampuan masyarakat untuk membayar menjadikan adanya pemutusan aliran air rumah tangga sehingga banyak masyarakat dengan latar ekonomi menengah kebawah harus mengonsumsi air yang berkualitas buruk dari sumber yang tidak diolah dengan benar. Masyarakat yang telah memutus aliran air rumah tangga dapat sewaktu-waktu memasang kembali sambungan air tersebut. Namun, dibutuhkan dana yang tidak kecil untuk melakukannya dimana penyambungan kembali aliran air dapat dilakukan dengan memotong pengeluaran biaya yang disisihkan untuk kesehatan dan pendidikan (Manthan Adhyayan Kendra, 2016).

Dampak kedua yang disebabkan oleh kebijakan air nasional yang mengundang partisipasi sektor swasta dan perusahaan asing terdapat pada lingkungan. Dampak lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekeringan. Kekeringan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, namun terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kekeringan terjadi di India. Faktor tersebut adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan dan kegiatan proyek yang berfokus pada ekstraksi dan eksploitasi air, baik dari permukaan maupun air tanah tanpa melakukan upaya yang cukup untuk pemeliharaan dan pelestarian air. Eksploitasi ini merupakan kegiatan yang tidak bijaksana dalam bidang ekologis (Action Aid India, 2016).

Eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dalam kegiatan penambangan air yang tidak berkelanjutan serta penambangan air tanah. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapat profit sebesar-besarnya melakukan hal tersebut guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam Kebijakan Air Nasional, perusahaan swasta yang sudah memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah juga diberikan izin untuk mengatur dan mengelola sumber daya air yang berada di wilayah proyeknya. Hal ini tidak termasuk jaminan yang mencegah perusahaan menambang air yang tidak ramah lingkungan (Manthan Adhyayan Kendra, 2016).

Dampak terakhir atas kebijakan air India terdapat pada kurangnya akses air minum bersih dan sanitasi. Kedua isu ini sering dikaitkan dengan kurang jelasnya perencanaan tata kelola, pembuangan yang tidak diolah, korupsi, dan juga tingginya

tingkat privatisasi air oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat kesempatan untuk mengolah sumber daya air India. India dengan populasi yang tinggi dan tidak meratanya persebaran masyarakat (dimana masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan) memiliki beberapa kesulitan dalam pengaturan airnya. Masih terdapat beberapa wilayah yang kurang—bahkan tidak mendapatkan akses air bersih. Masih banyak masyarakat pedesaan di India yang terletak di wilayah pinggiran yang diharuskan untuk mengebor sumur untuk mengakses sumber air tanah (Snyder, n.d.).

Setelah kebijakan mengenai privatisasi air dijalankan, masyarakat di wilayah pinggiran merasakan adanya perubahan yang signifikan mengenai naiknya harga sumber daya tersebut. Jumlah keluarga yang hidup dalam kemiskinan di India mencapai dua pertiga populasi dimana 68,8 persen keluarga hidup dengan kurang dari 2 dolar sehari dan bahkan lebih dari 30 persen memiliki pemasukan sebesar 1,25 dolar perhari (SOS Children Villages, n.d.). Permasalahan kemiskinan itu menjadikan adanya tingkat kesulitan untuk mengakses air semakin tinggi bagi masyarakat. Stabilitas keuangan masyarakat yang rendah dinilai belum mampu untuk menghadapi ketidakstabilan harga yang harus ditetapkan untuk mengakses air bersih. Seperti yang pada awalnya air dapat diakses dengan harga ₹50 atau setara dengan kurang lebih 10.000 rupiah perbulan dapat melonjak hingga ₹8000 atau setara dengan setidaknya 1,6 juta rupiah. Dalam jalannya proyek ini, akses air yang diberikan masyarakat dapat dipotong sewaktu-waktu apabila jumlah akumulatif dana yang dikumpulkan tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan ke pengelola air wilayah (Graham & Artwani, 2018).

PENTINGNYA QUALITY OVER QUANTITY: AKSES AIR INDIA

Dalam konsep materialisme historis Marxisme disebutkan bahwa kondisi sosial merupakan hal yang menyebabkan adanya perbedaan kelas pada masyarakat. Kelas sosial ini menentukan kepentingan yang berlanjut hingga sebuah tindakan seseorang untuk memenuhi hal tersebut (Magnis-Suseno, 2016).

Karena basis material menentukan kelas sosial, maka hubungan antar kelas-kelas sosial itu bersifat konfliktual. Kelas sosial dalam Marxisme terbagi menjadi dua

yaitu kelas borjuis yang merupakan ‘kaum mempunya’ (*the have*) yang memegang kendali kontrol atas alat-alat produksi dan kelas proletar atau ‘golongan tak mempunya’ (*the have not*) atau kaum kelas bawah yang menjual tenaganya kepada kelas kapitalis. Dalam pembagian kelas tersebut, penelitian ini akan membagi aktor menjadi dua kelas yaitu yang pertama adalah pemerintah dan perusahaan asing sebagai kelas yang memiliki kekuatan untuk mengatur hak atas air atau kelas borjuis dan kelas kedua terdiri dari masyarakat India yang tergolong sebagai kelas bawah yang masih memiliki banyak kekurangan dan kesulitan untuk mengakses hal tersebut atau dapat disebut kelas proletar.

Munculnya Kebijakan Air Nasional India tahun 2002 memperlihatkan adanya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan asing dengan memberikan pengalihan kontrol dan layanan pengelolaan airnya kepada perusahaan yang terpilih. Dibuatnya kebijakan ini menjadi salah satu cara India untuk mereformasi sumber daya air yang dimiliki. Selain kebijakan, cara lain yang dilakukan India untuk mereformasi sumber daya airnya adalah dengan melakukan privatisasi air yang didukung oleh organisasi multinasional domestik hingga internasional.

Reformasi kebijakan yang dilakukan oleh India menyebabkan adanya kesenjangan antar kelas dimana kelas yang memiliki kekuatan untuk mengatur dapat melakukan tindakan semena-mena kepada kelas yang berada dibawahnya. Hal ini kemudian menyebabkan adanya beberapa dampak, salah satunya adalah munculnya kegiatan monopoli dimana perusahaan dapat meminta pembayaran retribusi untuk layanan yang diberikan dengan harga tinggi. Naiknya harga retribusi yang diminta oleh perusahaan dapat meningkat dari 10 hingga 25 persen. Hal ini kemudian menyebabkan turunnya akses masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan untuk mendapatkan haknya atas air bersih. Perusahaan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah juga dapat memunculkan pelarangan penggunaan sumber daya air kepada masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Alasan mengapa hubungan kerjasama pemerintah dan perusahaan multinasional asing mampu menyebabkan isu ketidaksetaraan akses air terjadi di India pasca dibuatnya Kebijakan Air Nasional tahun 2002 adalah karena dalam kebijakan tersebut pemerintah India meminta adanya pengalihan kontrol dan layanan pengelolaan air ke perusahaan swasta. Pengalihan kontrol ini bertujuan supaya perusahaan asing yang memiliki ide-ide inovatif dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan atas air yang kurang baik di India.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah India dalam mengundang partisipasi sektor swasta adalah untuk menarik minat perusahaan asing dalam melakukan proyeknya di negara tersebut. Proyek yang dijalankan oleh perusahaan ini mampu menghasilkan adanya aliran investasi asing masuk ke India. Sebagai gantinya, pemerintah India memberikan kemudahan berbisnis dan memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya airnya. Namun pada nyatanya kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pengelolaan air mengalami banyak kekurangan. Seperti contohnya terdapat pada dampak ekonomi dimana perusahaan dengan semena-mena mampu menaikkan tarif harga dan menutup layanan akses air lokal kepada masyarakat terutama yang berada di pedesaan. Dampak kedua ada di bidang lingkungan dimana perusahaan yang memenangkan proyek mampu mengakses sumber daya air India dan diberikan izin untuk mengatur persediaan hal tersebut sehingga tidak sedikit perusahaan yang mengekstraksi dan mengeksploitasi air tanpa adanya upaya yang cukup untuk pemeliharaan dan pelestarian air. Dampak terakhir terdapat pada kurangnya akses air bersih dan sanitasi di banyak wilayah India karena pengaliran air yang terbatas.

Jalannya proyek yang dilakukan oleh perusahaan asing yang dalam penelitian ini tertuju pada perusahaan Suez Degremont, mengalami banyak ketidak optimalan. Ketidak optimalan perusahaan ini tertuju pada kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan di suatu daerah di India bernama Uttar Pradesh dimana pada daerah tersebut, perusahaan mengambil dan mengekstraksi air untuk dialirkan ke wilayah yang

lebih metropolitan di India seperti New Delhi. Pengekstraksian air ini menyebabkan adanya kekurangan akses air yang dibutuhkan oleh masyarakat di Uttar Pradesh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Hermini Susiatiningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Fendy E. Wahyudi, S.IP., M.Hub. Int. selaku dosen pembimbing 2 dan Ibu Anjani Tri Fatharani, S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Action Aid India. (2016, June 8). Retrieved from India Drought 2016: <https://www.actionaidindia.org/blog/india-drought-2016/>
- Banerjee, P. (2014). Energy Security through Privatisation: Policy Insights from Hydroelectric Power Projects (HEPs) in India's Northeast. *The Center for Strategic Studies (SAM)*, 41-42.
- Belhoste, N., & Grasset, J. (2008). The Chaotic History of Foreign Companies in India. The Institut Français des Relations Internationales,
- Bhattacharya, S., & Banerjee, A. (2015). Water privatization in developing countries: Principles, implementations and socio-economic consequences. *World Scientific News*, 19-20.
- Central Water Commission. (n.d.). *National Water Policy*. New Delhi.
- Dwivedi, G. (2015, November 23). Retrieved from An Overview of Water Sector Reforms in India: <https://www.blueplanetproject.net/index.php/an-overview-of-water-sector-reforms-in-india/>
- Dwivedi, G. (2010). In *Public-Private Partnerships in Water Sector: Partnerships or Privatization?* Badwani: Manthan Adhyayan Kendra.

- Dwiwedi, G. (2016, September 28). *Privatisation and Commercialisation of Water in India*. Retrieved from <https://www.cag.org.in/blogs/privatisation-and-commercialisation-water-india>
- Economic Times. (2021, July 27). *Economy: Policy*. Retrieved from Government says 78 foreign companies registered in India last fiscal year: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/government-says-78-foreign-companies-registered-in-india-last-fiscal-year/articleshow/84793671.cms>
- Friedrich, E. (1955). Manifesto of the Communist Party. In K. Marx, & E. Friedrich, *The Communist Manifesto* (pp. 5-6). New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Fuentes, G. (2018, November 8). *What is International Investment Theory?* Retrieved from <https://pocketsense.com/international-investment-theory-5905368.html>
- Graham, C., & Artwani, M. (2018). The Community. In *Analysis of the effects of water privatisation on marginalised communities in Karnataka* (pp. 11-13). Karnataka: People's Campaign for Right to Water.
- IGI Global. (n.d.). *What is Private Sector Participation*. Retrieved from <https://www.igi-global.com/dictionary/private-sector-development-in-waste-management-in-rural-areas/67385#:~:text=1.,a%20government%20or%20public%20body.>
- Times of India. (2019, December 12). *French firm Suez not supplying enough water to public: CPM*. Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/french-firm-suez-not-supplying-enough-water-to-public-cpm/articleshow/72482024.cms>
- India Water Portal. (n.d.). *Privatisation*. Retrieved from <https://www.indiawaterportal.org/topics/privatisation#:~:text=Water%20privatization%20in%20India%20started,participation%20in%20the%20water%20sector.>

- Kaur, N. (2003, September 12). Retrieved from Privatising Water: <https://frontline.thehindu.com/other/article30218737.ece>
- Luthra, R., & Koshy, S. (2017). Doing Business in India. *Thomson Reuters Practical Law*, 4-5.
- Magnis-Suseno, F. (2016) *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, cet. 10. Jakarta: Gramedia
- Manthan Adhyayan Kendra. (2016, July 30). *India Country Brief*. Retrieved from <http://www.manthan-india.org/wp-content/uploads/2015/04/India-Country-Brief-for-Water-Sector-2009.pdf>
- Ministry of Corporate Affairs (2006), *50th Annual Report*, Government of India, New Delhi. http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/50AR_E
- MoWR. (2002). *NATIONAL WATER POLICY, Ministry of Water Resources Government of India Ministry of Water Resources*. [http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/National Water Policy_%28MoWR%29_2002.pdf](http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/National%20Water%20Policy_%28MoWR%29_2002.pdf)
- Paranjpye, V., & Rathore, M. S. (2014). Position Paper on Understanding and Implementation of National Water Policy India – 2012. 2-
- Sampath, A., Kedarnath, B., Ramanujam, C., Haidery, H., Rao, R., Arunachalam, R., Govindaraju, S., Thirumalavan, V., & Jeet, V. (2003). Water Privatization and Implications in India. *Association for India's Development, January 2003*, 1. http://www.doccentre.org/docsweb/water/water_privatization.pdf
- Seth, B. L. (2012, July 18). *Revised draft national water policy restores priority to agriculture*. Diambil kembali dari <https://www.downtoearth.org.in/news/revised-draft-national-water-policy-restores-priority-to-agriculture-38696>
- Shiva, V. (2008). Globalization from Below: Ecofeminist Alternatives to Corporate Globalization. In *Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century*. Berlin: Springer

Snyder, S. (n.d). *Water in Crisis – India*. Diambil kembali dari <https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-india>

SOS Children Villages. (n.d). *Poverty in India: Facts and Figures on the Daily Struggle for Survival*. Diambil kembali dari <https://www.soschildrensvillages.ca/news/poverty-in-india-602>

The Water Project. (n.d). *Water Crisis - India*. Diambil kembali dari <https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-india#:~:text=India's%20water%20crisis%20is%20often,1.6%20billion%20by%20year%202050>.